

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS KINERJA ANGGARAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Marlena¹, Retno Murnisari², Nikita Larasati Purbaningrum³

cahayoe.n42@gmail.com*

Universitas Tulungagung¹, STIE Kesuma Negara Blitar², Universitas Tulungagung³

Abstract

This study aims to analyze how the realization of the budget in assessing the effectiveness of performance at the Department of Transportation of Tulungagung Regency. The research method used is descriptive quantitative. The data collection includes data collection, observation, interviews and literature review. Research variables are Budget Realization and Budget Performance Effectiveness. The results of this study indicate that the Budget Realization Analysis to Assess the Effectiveness of Budget Performance at the Tulungagung Regency Transportation Service for the 2019-2021 period is said to be very effective. Because the data that has been obtained by researchers has been processed and get good results too.

Keywords: Budget Realization Report, Revenue Effectiveness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana realisasi anggaran dalam menilai efektivitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Pengumpulan datanya meliputi pengambilan data, observasi, wawancara dan tinjauan pustaka. Variabel Penelitian adalah Realisasi Anggaran dan Efektivitas Kinerja Anggaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung periode 2019-2021 dikatakan sangat efektif. Karena data-data yang telah peroleh peneliti sudah diolah dan mendapatkan hasil yang baik pula.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Efektivitas Pendapatan.

*Penulis Korespondensi

1. Pendahuluan

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik yang ada di negara kita, dari tahun ke tahun mulai meningkat dengan adanya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk saat ini akuntansi sektor publik banyak digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah dan organisasi publik lainnya. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh besar bagi nasib suatu daerah karena bisa menjadi daerah yang kuat dan mampu mengembangkan kinerja dalam mengelola keuangan. Untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi agar bisa mengurangi pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, maka pengelolaan daerah harus dilaksanakan secara efektif, transparansi, akuntabilitas dan adil. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan pembiayaan pemerintah terhadap kegiatan pelaksanaan dan pembangunan.

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Jamaluddin, 2019). Pemerintah yang bersih diharapkan oleh masyarakat untuk menyediakan informasi secara transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan. Jadi pemerintah bisa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa laporan pengelolaan keuangan yang disusun sesuai akuntansi untuk sektor publik (Laila & Handayani, 2019).

Organisasi sektor publik harus memperhatikan value for money dalam menjalankan suatu kegiatan (Jamaluddin, 2019). Value for money sendiri bisa diartikan dengan pengukuran kinerja sektor publik yang memberikan informasi tentang suatu anggaran yang telah dibelanjakan sudah menghasilkan sesuatu nilai atau tidak bagi masyarakat. Pengukuran yang dimaksud meliputi ekonomi, efektif, dan efisien. Dengan value for money organisasi sektor publik bisa meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan publik, dan alokasi belanja bisa lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Value for money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal ini dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. (Nurkholis & Khusaini, 2019)

Dengan penerapan prinsip efektivitas untuk anggaran yang dikelola oleh organisasi sektor publik, prinsip efektivitas inilah yang menjadi indikator dalam kinerja keuangan suatu entitas (Waney, *et. al.*, 2018). Efektivitas kinerja

bisa menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan kegiatan. Maka dari itu pemerintah dituntut agar mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Julita mengemukakan anggaran sebagai rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif selama jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam satuan barang (Anggaran, 2017). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah bagian penting dalam suatu instansi dan berfungsi untuk mengetahui keadaan keuangannya (Heldawati, 2021). Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi atau yang sering kita dengar dengan aktivitas pengelolaan dan kumpulan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan.

Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas lebih penting, dan LRA ini termasuk kedalam jenis laporan keuangan yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional dan laporan arus kas (Aprilia, 2019). Laporan Realisasi Anggaran adalah jenis laporan keuangan yang pertama diproses sebelum membuat neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi dan distribusi. Alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia Edisi 2019, Laporan Realisasi Anggaran memiliki tujuan menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut (PSAP). Untuk Laporan Realisasi Anggaran, ditetapkan pada pasal 4 ayat 2 yang berbunyi PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Landasan hukum tersebut yang menjadi pedoman pembuatan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.

Tingkat keberhasilan penganggaran bisa ditunjukkan dengan adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja apabila terjadi defisit dan surplus anggaran, berarti pelaksanaan tersebut dinyatakan gagal. Dari hal tersebut maka terbentuklah pemikiran bahwa penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan harus (100%) agar tidak terjadi surplus atau defisit tanpa memperhatikan efektivitas dan efisiensinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dijadikan standar dalam menilai kinerja keuangan pemerintah atau instansi tertentu. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kebutuhan dan potensi yang ada dimasing-masing instansi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, dan sekaligus sebagai alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara (Yuesti et al., 2020). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Purwanti, 2018). Anggaran adalah alat penting untuk pengendalian dan perencanaan yang efektif dalam pemerintahan yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang berisikan pendapatan dan beban yang direncanakan pada tahun tersebut. Untuk bahan prediksi maka dibutuhkan data dan informasi yang baik, karena akan berpengaruh terhadap keakuratan prediksi dalam proses perencanaan anggaran (Sawir, 2017).

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan efektif dan efisien, karena berkaitan dengan penerimaan daerah, namun tidak semua bisa sesuai atau mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Maka dari itu dengan pengelolaan keuangan yang belum efektif dan efisien maka perlu dioptimalkan lagi agar pengelolaannya menjadi lebih baik

Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan yang berisi program kegiatan dan jumlah anggaran dana yang didapat dan dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) yaitu sistem yang saat ini berkembang pesat dan banyak dipakai oleh negara maju sebagai pengganti sistem yang

lama yang sering kita sebut dengan Line Item Budgeting (Yuesti, 2019). Secara umum anggaran berbasis kinerja yaitu pendekatan sistematis dalam menyusun anggaran yang berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dengan hasil kinerja yang menggunakan informasi kinerja. Pada dasarnya sistem anggaran kinerja mencakup kegiatan menyusun program dan dijadikan tolak ukur kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Realisasi anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran, yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan, dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran, dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran dimulai ketika Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penilaian terhadap efektivitas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja biasanya menggunakan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang bertumpu pada output yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan outcome (Syam, 2020).

Realisasi anggaran yang tidak optimal bisa terlihat dari adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan fakta yang ada penulis menganalisis secara khusus anggaran dan realisasi kegiatan keuangan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, bahwa kinerja suatu instansi berkaitan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung merupakan wadah untuk mengurus kebijakan perhubungan atau transportasi di wilayah Tulungagung, penyelenggaraan administrasi, termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait dengan bidang perhubungan.

2. Metode

Pelaksanaan dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No 117, Kecamatan Karangwaru, Kabupaten Tulungagung. Waktu penelitian pengambilan data/observasi dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Desain penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research), alat yang digunakan untuk desain ini yaitu Observasi

dan Pengambilan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah sebuah kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Yuesti *et al.*, 2020).

Tabel 2. Perkembangan Tingkat Efektivitas Selama Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kenaikan/ penurunan
2019	9.325.696.910,00	9.907.932.500,00	106,24%	0%
2020	6.959.368.500,00	9.751.007.500,00	140,11%	33,87%
2021	9.834.338.000,00	10.877.852.500,00	110,61%	(29,50%)

Sumber : Data Sekunder, diolah 2022.

Tabel 3. Tingkat Efektivitas dengan Kriteria

Periode	Persentase	Kriteria	Kategori
2019	106,24%	90-100%	Sangat efektif
2020	140,11%	90-100%	Sangat efektif
2021	110,61%	90-100%	Sangat efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada periode 2019-2021 memiliki tingkat efektivitas diatas 100%. Hasil ini bisa diartikan jika Dinas Perhubungan dalam mengelola anggaran dikategorikan sangat efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran. Selama tahun 2019-2021 anggaran penerimaan PAD semakin meningkat, walaupun tingkat efektivitas penerimaan PAD mengalami naik turun, namun prosentase efektivitasnya tetap berada diatas 100%, dengan hasil presentase keseluruhan nilai efektivitas yang menunjukkan nilai diatas 100%.

Analisis Efisiensi

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (output-outcome). Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsi keluaran

kegiatan pada jangka menengah. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur outcome (Ulfa, 2018).

Tabel 4. Perkembangan Tingkat Efisiensi Selama Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kenaikan/ penurunan
2019	19.721.450.000,00	19.067.637.591,00	96,68%	0,00%
2020	43.705.409.288,00	41.565.398.417,53	95,10%	(1,58%)
2021	50.562.401.781,00	48.043.716.903,67	95,01%	(0,09%)

Sumber : Data Sekunder, diolah 2022.

Tabel 4. Tingkat Efisiensi dengan Kriteria

Periode	Persentase	Kriteria	Kategori
2019	96,68%	90-100%	Kurang Efisien
2020	95,10%	90-100%	Kurang Efisien
2021	95,01%	90-100%	Kurang Efisien

Sumber : Data Sekunder, diolah 2022.

Dari data diatas, bisa diketahui jika pada periode 2019-2021 tingkat efisiensi anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung diatas 90% yang artinya kurang efisien. Namun di tahun 2020 dan 2021 anggaran belanja sudah mulai mengalami penurunan walaupun tidak banyak. Dengan ini diyakini bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sudah menggunakan anggaran belanjanya sebaik mungkin. Semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% bahkan lebih, itu bisa diartikan jika tingkat efisiensi yang kurang baik, dengan indikasi bahwa terjadi kecenderungan pemborosan anggaran.

Pembahasan

Dari analisis yang telah dilakukan, efektivitas menunjukkan kesuksesan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan darimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai sesungguhnya. Efektivitas merupakan antara output dan tujuan.

Dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, bagaimana realisasi anggaran untuk menilai efektivitas kinerja anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, hasil pada realisasi anggaran untuk

menilai efektivitas kinerja anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada periode 2019-2021 memiliki tingkat efektivitas diatas 100%. Hasil ini bisa diartikan jika Dinas Perhubungan dalam mengelola anggaran dikategorikan sangat efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran.

Selama tahun 2019-2021 anggaran PAD semakin meningkat, dapat dilihat dari tahun 2019 perolehan anggaran sebesar Rp9.325.696.910,00 dan realisasi sebesar Rp9.907.932.500,00, selisih dari perolehan anggaran dengan realisasi sebesar Rp582.325.590,00 dengan prosentase nilai 106,24% dikategorikan sangat efektif karena melebihi 100%. Pada tahun 2020 perolehan anggaran sebesar Rp6.959.368.500,00 dan realisasi sebesar Rp9.751.007.500,00, selisih dari perolehan anggaran dengan realisasi sebesar Rp2.791.639.000,00 dengan prosentase 140,11% dikategorikan sangat efektif bahkan mengalami kenaikan sebesar 33,87% dari sebelumnya.

Tahun 2021 anggaran perolehan Rp9.834.338.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.877.852.500,00 dengan selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp1.043.514.500,00 dengan prosentase sebesar 110,61%, pada tahun ini mengalami penurunan sebanyak 29,50%, namun dikategorikan sangat efektif karena masih melebihi 100%. Setelah itu diketahui jika pada tahun tersebut mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia, ini terjadi karena pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk tidak berpergian, jadi penerimaan untuk retribusi parkir tepi jalan umum mengalami sedikit penurunan.

Tabel 4 menunjukkan pada tahun 2019 perolehan anggaran sebesar Rp19.721.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.067.637.591,00 dan sisa anggaran sebesar Rp653.812.409,00 dengan prosentase nilai sebesar 96,68%, dari data ini anggaran pada tahun 2019 dikegorikan kurang efisien karena diatas 90%. Pada tahun 2020, perolehan anggaran sebesar Rp43.705.409.288,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp41.565.398.417,53 dengan sisa anggaran Rp2.140.010.870,00 dan prosentase 95,1% yang artinya mengalami penurunan tingkat efisiensi sebesar 1,58%, dengan penurunan anggaran belanja ini diharapkan kedepannya tidak terjadi pemborosan belanja, dan pada tahun 2020 tingkat efisiensinya masih dikategorikan kurang efisien. Pada tahun 2021, perolehan anggaran sebesar Rp50.562.401.781,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp48.043.716.903,67 dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.518.684.877,33 dengan prosentase sebesar

95,01%. Pada tahun 2020 tersebut tingkat efisiennya mengalami penurunan sebesar 0,09% dengan kategori kurang efisien karena tingkat efisiennya di bawah 100%.

Selain pengambilan data laporan anggaran periode 2019-2021 yang menjadi acuan peneliti, peneliti juga melakukan sedikit wawancara dengan pegawai di tempat penelitian yang tahu pasti tentang keuangan, jika anggaran kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung bisa dikatakan baik karena pimpinan dan orang-orang yang menjalankan sistem anggaran adalah orang-orang yang berkompeten dan berpengalaman dibidangnya. Dan peneliti juga setuju dengan yang dikatakan peneliti dahulu jika realisasi anggaran berpengaruh dengan efektivitas dan efisiensi suatu daerah yaitu salah satu faktornya adalah faktor individu, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, belanja modal, dan Pendapatan Asli Daerah.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung selama periode 2019-2021 dapat dikatakan sangat efektif, dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata diatas 100% lebih tepatnya 118,98%.
- b. Perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung selama periode 2019-2021 dapat dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerahnya. Pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa tingkat efisiensi mengalami penurunan, karena telah melakukan perbaikan kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
- c. Keterbatasan yang peneliti alami yaitu dengan terbatasnya data yang diperoleh. Peneliti hanya mendapat data berupa jumlah keseluruhan dari target dan realisasi anggaran penerimaan PAD dan belanja keseluruhan selama periode 2019-2021.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat membandingkan kinerja keuangan kabupaten atau kota yang memiliki potensi besar dalam mengelola keuangan daerahnya,

sehingga hasil penelitian lebih memiliki kontribusi yang jelas bahwa ada kabupaten atau kota tertentu yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari kota yang lainnya. Diharapkan peneliti berikutnya menggunakan metode yang bervariasi, tidak hanya menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi dalam menilai kinerja anggaran sektor publik.

5. Referensi

- Aprilia, N. 2019. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelav IV Tegal. *Politeknik Harapan Bersama Tegal*.
- Heldawati. 2021. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupatek Luwu. *Skripsi*. Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
- Jamaluddin, M. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almailda
- Laila, A., Noor, R., & Handayani, N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(7), 1-15.
- Nurkholis, & Khusaini, M. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press
- Nursanti, J. 2021. Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Penggunaan Sistem Kearsipan Berbasis Elektronik Dikantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 2 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Purwanti, S. R. 2018. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Pada Kantor Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Periode 2013-2017. *Jurnal Simki Economic*. 2(11). 1-17.
- Sawir, M. 2017. Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*. 1(1), 9-18.
- Syam, S. 2020. Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152.
<https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>

- Ulfa, S. M. 2018. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. *Skripsi*
- Waney, C. K., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. 2018. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 334-341. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19527.2018>
- Yunina, F. 2019. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74-81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>